

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendansari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. (*sumber, pengantar analisis kebijakan*)

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif (*Sumber, Buku Ajar Mata Kuliah Evaluasi Kebijakan*).

Evaluasi program pembuatan KTP gratis lebih khusus di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang adalah bagaimana pelaku kebijakan mulai dari kebijakan pembuatan KTP Gratis diimplementasikan dan samapai pada pelaksanaannya adalah jenis evaluasi normatif karena pelaksanaan program pembuatan KTP gratis masih berjalan sampai saat ini. Evaluasi program pembuatan KTP gratis menggunakan teori Van Mette dan Van Horn dengan beberapa indikator

yaitu: sasaran /ukuran tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi , serta lingkungan sosial dan politik

5.1 Stanndar Dan Sasaran Kebijakan

Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran kebijakan. Begitu pula kinerja implementasi dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan tersebut.

Untuk mencapai keberhasilan ukuran dan tujuan Program Pembuatan KTP Gratis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka, aspek-aspek yang diukur dalam indikator ini adalah:

- Prosedur pembuatan KTP-Elektronik

Prosedur pembuatan KTP-Elektronik tidak memiliki banyak perubahan dimana dukcapil memperoleh data dari masyarakat langsung maupun melalui tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ratna yang merupakan KASUBAG Kepegawaiaan yang merupakan perwakilan Kepala Dinas dukcapil kota kupang, pada tanggal 19 November 2019, mengatakan bahwa :

“ prosedur pembuatan KTP manual dengan KTP-Elektronik tidak terlalu berbeda yaitu kami memperoleh data dari kecamatan maupun dari masyarakat langsung hanya proses verifikasi data yang makin ketat dan masa berlaku KTPnya yang berbeda kalau prosedur tidak ada perubahan”

Sebagai pendukung dari hasil wawancara penulis juga memeproleh data prosedur pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang terkait pembuatan KTP- Elektornik terdapat pada tabel :

Tabel 5.1 Standar Pelayanan KTP-Elektronik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	KTP-Elektronik
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perekaman di Kantor Camat atau Dinas Dukcapil Kota Kupang bagi yang belum pernah melakukan perekaman dimanapun dan menyerahkan bukti perekaman tersebut ke Dukcapil Kota Kupang 2. Apabila terjadi perubahan elemen data pribadi wajib melampirkan dokumen pendukung yang bekekuatan hukum tetap seperti foto copy akta kelahiran, ijaza, dll. Bila terjadi perubahan domisili wajib melampirkan surat keterangan pindah dari Dukcapil daerah asal (bagi pengurusan KTP-Elektronik perubahan) 3. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian (bagi KTP-Elektronik penggantian)
3	Sistem,Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melengkapi persyaratan 2. Front office melakukan verifikasi permohonan, jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon

		<p>3. Back office memproses dan mencetak KTP-Elektronik</p> <p>4. Front office menyerahkan KTP-Elektronik kepada pemohon</p>
4	Estimasi Waktu	<p>1 hari untuk pencetakan karena perubahan data atau penggantian</p> <p>Sedangkan untuk perekaman baru , waktunya tergantung proses penunggalan di data center Dukcapil Kemendagri Jakarta berhasil.</p>
5	Biaya	GRATIS
6	Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>1. Kotak saran dan pengaduan</p> <p>2. No. HP : 08113815501</p> <p>3. EMAIL :dukcapil5371@gmail.com</p> <p>4. Website :www.dukcapil.kupang.go.id www.e-bisakupangkota.go.id</p>

Dari
hasil

(sumber dispenduk kota kupang 2019)

wawancara dan data yang peroleh, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan yaitu :

- ❖ perekaman dan pendataan bisa dilakukan di tingkat Kecamatan Dan Di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang

❖ verifikasi dan pencetakan dilakukan di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Kupang

- Keterlibatan sasaran program dalam pelaksanaan program

Keterlibatan sasaran program dalam suatu program sangatlah penting, karena merupakan obyek utama dari adanya program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Emanuel selaku KABID Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, tanggal 29 November 2019, mengatakan bahwa :

“salah satu kendala paling utama dari kami pihak dinas adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi, secara umum masyarakat mengurus KTP-Eletronik karena ada kepentingan tertentu bukan karena kesadaran bahwa KTP itu penting”

Penulis juga sependapat dengan pernyataan Bapak Eman terkait rendahnya kesadaran masyarakat, berdasarkan pengalaman selama ini penulis mengamati bahwa masyarakat mengurus KTP hanya karena ada kepentingan tertentu misalnya : akan memperoleh bantuan sosial dengan persyaratan memiliki KTP, akan mengadakan pemilu, dan lain-lain

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ketelibatan masyarakat dalam program terkait masih sangat minim, karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi

- Jenis kegiatan lingkungan yang dijalankan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Emanuel selaku kabid pengelolaan sistem informasi kependudukan , tanggal 29 November 2019, Bapak Eman mengatakan bahwa :

“kami pernah melakukan sosialisasi tahun 2018, tetapi tahun 2019 kami tidak melaksanakan sosialisasi karena tidak ada anggaran untuk tahun 2019 dan untuk pelaksanaan sosialisasi belum ada anggaran khusus ”

Didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Dominikus yang merupakan masyarakat kota kupang, tanggal 27 november 2019, bapak dominikus mengatakan bahwa :

“selama ini saya selaku masyarakat kota kupang belum pernah mendengar ataupun meperoleh informasi terkait sosialisasi KTP-Elektronik”

Senada dengan bapak Domikus, hasil wawancara tanggal 19 november 2019 dengan ibu yovita yang juga merupakan masyarakat kota kupang, mengatakan bahwa :

“selain melakukan kegiatan perekaman di tingkat kecamatan, saya belum mengikuti kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh dukcapil apalagi sosialisasi ”

Berdasarkan pengamatan penulis terkait kegiatan lingkungan yang berhubungan dengan pembuatan KTP pada Dispenduk, Dispenduk belum memiliki agenda khusus untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bukan merupakan hal yang serius diperhatikan oleh dinas terkait

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat disimpulkan bahwa untuk jenis kegiatan lingkungan dalam rangka implementasi program pembuatan KTP

gratis belum adanya perhatian khusus dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kupang karena kendala anggaran.

5.2 Sumber Daya

Sumber daya pada dasarnya merupakan komponen utama yang sangat mendukung keberhasilan program, program yang memiliki sumber daya yang baik akan lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Aspek yang paling penting dalam penentuan keberhasilan program pembuatan KTP gratis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang adalah sumber daya. Baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya modal. Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan program pembuatan KTP gratis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang :

- Sumber daya keuangan

Keuangan juga merupakan aspek penting dalam implementasi program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratna yang meruoakan KASUBAG Kepegawaian DUKCSPIL Kota Kupang, pada tanggal 19 November 2019, mengatakan bahwa :

“untuk semua program jelas memiliki anggaran masing-masing, berdasarkan pengalaman saya selama ini belum ada kendala soal keuangan mengenai program pembuatan KTP gratis, saya ambil contoh soal pengadaan blangko pusat menetapkan banyaknya blangko KTP-Eletronik dan kami akan menetapkan anggaran dan karena diperoleh dari pihak ketiga”

Senada dengan Ibu Ratna, Bapak Emanuel selaku KABID pengelolaan informasi administrasi kependudukan, tanggal 29 november 2019, mengatakan bahwa :

“setiap tahunnya untuk penggarangan untuk program KTP ini belum mencukupi selain itu penyediaan blangko yang sangat amat terbatas dari tingkat pusat, ini dapat dilihat dari antrenya 13.000 data KTP yang belum dicetak ”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa : sumber daya keuangan atau pendanaan untuk program pembuatan KTP Gratis masih kurang memadai buktinya masih 13.000 data perekaman KTP yang beluk tercetak karena kekurangan blangko KTP dan kondisi peralatan yang kerap kali error.

- Kemampuan teknis pelaksana program (operator)

Kemampuan atau pengetahuan dari para pelaksana program dalam megimplentasikan program itu sangatlah penting untuk keberhasilan program.

Hasil wawancara dengan Bapak Eman selaku KABID Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tanggal 29 november 2019, mengatakan bahwa :

“untuk kemampuan teknis khusus dibidang pengolahan data dan informasi masih perlu peningkatan untuk kemampuan teknisnya lebih khusus untuk pengoperasian komputer, karena pekerjaan kami dibidang berkaitan dengan pengolahan data berbasis komputer”

Berdasarkan pengamatan penulis terkait kemampuan teknis dari para operator masih kurang, sebagai contoh website resmi Dinas kependudukan dan pencatan sipil kota kupang sampai saat ini masih bermasalah dan belum diatasi dengan alasan belum ada pegawai khusus yang mengurus bagian website.

- Waktu yang digunakan dalam proses pembuatan KTP

Mengenai estimasi waktu dalam penyelesaian sebuah KTP-Elektronik belum ada kepastian terlihat pada tabel 5.1 mengenai estimasi waktu, 1 (satu) hari untuk pencetakan karena perubahan data /pergantian, sedangkan untuk perekaman baru, waktunya tergantung proses penunggalan di data center Dukcapil Kemendagri Berhasil dan didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Ratna , pada tanggal 19 November 2019, Ibu Ratna mengatakan bahwa :

“cepat atau lambatnya keluar sebuah KTP tergantung dari proses penunggalan data di pusat dan keadaan koneksi jaringan dikantor , oleh karena itu kami disini tidak menetapkan berapa lama untuk perekaman baru itu bisa diselesaikan ”

Dan hasil wawancara dengan bapak Emanuel P. Temaluru selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,29 November 2019, Bapak mengatakan bahwa :

“ tahun ini ada 13.000 masyarakat yang sudah melakukan perekaman tetapi KTPnya belum tercetak karena beberapa alasan pesediaan blangko kami sangat terbatas dan jaringan komunikasi data yang sering kali mengalami error”

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis yang didukung oleh data standar pelayanan KTP-Elektronik Dukcapil Kota Kupang penulis menyimpulkan beberapa point yaitu :Estimasi waktu yang tidak konsisten terhadap penyelesaian KTP-Elektronik baru karena beberapa penyebab : proses penunggalan data di pusat yang tidak pasti, kondisi koneksi online yang kurang baik, dan peralatan yang mengalami kerusakan.

5.3 Karakteristik organisasi pelaksana

- Kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan program pembuatan KTP gratis Kota Kupang.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kedisiplinan pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang masih sangat kurang, beberapa kebiasaan pegawai yang kurang baik menurut pengamatan penulis : pegawai sering terlambat masuk kantor, merokok didalam kantor khusus untuk para pegawai pria. Didukung oleh hasil wawancara dengan saudara Sebastian selaku masyarakat Kota Kupang, mengatakan bahwa :

“saat saya mengurus KTP Di DISPENDUK saya beberapa kali mendapati pegawai yang datang ke kantor diatas jam 09.00”

5.4 Komunikasi antar Organisasi

- Kejelasan dan konsistensi informasi dari dinas terkait kepada masyarakat

Berdasarkan pengamatan penulis konsistensi informasi dinas kependudukan kepada masyarakat masih kurang baik, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya jumlah data perekaman masyarakat yang belum tercetak dan dari tabel standar pelayanan yang belum bisa menetapkan waktu penyelesaian KTP untuk perekaman baru oleh DISPENDUK., dan didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Lina Rajatuka yang merupakan masyarakat kota kupang yang telah mengurus KTP-Elektronik, 18 November 2019, Ibu Lina mengungkapkan bahwa :

“untuk keluar KTP sekarang ini butuh waktu yang sangat lama, waktu saya mengurus KTP kurang lebih 4 bulan baru bisa ambil KTP dan yang mengambil juga waktu itu bukan saya sendiri tetapi adik saya yang kerja di dukcapil”

Senada dengan Ibu Lina Rajatuka, bapak marselinus mengungkapkan bahwa :

“saya mengurus KTP-Elektronik tahun 2016 lalu, selama kurang lebih 6 bulan setelah perekaman baru KTP dicetak”

Dan hasil wawancara dengan saudara Sebastian yang juga merupakan masyarakat kota kupang yang telah mengurus KTP-Elektronik, tanggal 19 November 2019, beliau mengatakan bahwa :

“pengurusan KTP sekarang sangat menguras waktu dan tenaga, karena setelah perekaman kita harus cek ke dukcapil hampir setiap hari, jika tidak mungkin KTP kita tidak akan keluar”

Berbeda dengan responden sebelumnya bapak Heronimus yang merupakan masyarakat Kota Kupang mengungkapkan bahwa

“kepengurusan KTP-Elektronik tidak berlangsung lama, tiga hari setelah melakukan perekaman KTPnya langsung dicetak”

Hasil pengamatan yang didukung oleh hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, untuk konsistensi informasi dinas DUKCAPIL kepada masyarakat kurang baik karena belum bisa menginformasikan waktu penyelesaian KTP-Elektronik untuk perekaman baru, sering memberikan informasi pencetakan yang kurang jelas dan pelayanan yang berbelit-belit.

- Koordinasi dinas terkait dengan pemerintah tingkat kecamatan

Berdasarkan pengamatan penulis koordinasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang dengan pemerintah kecamatan cukup baik, sementara hubungan dengan instansi lain yang berhubungan dengan masyarakat

masih sangat kurang misalnya : melakukan pendataan langsung ke tingkat kelurahan/desa, mengadakan agenda khusus untuk pertemuan dengan DPRD agar bisa mendengar segala bentuk usul maupun saran yang mewakili suara masyarakat untuk keberhasilan program, atau mengadakan perbandingan data penduduk dengan badan statistik agar bisa memastikan tingkat keakuratan data.

Dari hasil pengamatan juga penulis menemukan masalah data kependudukan lebih tepatnya data penduduk wajib KTP yang mengurus KTP tahun 2018 dan sebelumnya tidak ditata dengan baik akibatnya semua data hilang dan tidak dapat backup, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang mengalami persoalan data tersebut yang berdampak buruk terhadap kinerja instansi.

Hasil wawancara dengan Bapak Emanuel selaku Kabid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tanggal 29 november 2019, mengatakan bahwa :

“sejauh ini hubungan kami dengan tingkat kecamatan masih terkoordinasi dengan baik dalam arti pihak kecamatan melakukan perekaman, setelah kami memperoleh data yang kami melakukan pengecekan kembali data berupa search biometrik agar tidak terjadi duplikat data”

Dari hasil pengamatan penulis dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa koordinasi antar dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi lain masih sangat minim hal ini terbukti dari data kependudukan yang hilang, dan dari kurangnya perhatian terhadap masyarakat terkait pemahaman masyarakat terhadap Program Pembuatan KTP Gratis.

- Proses perolehan data dari masyarakat

Pada proses perolehan data dari masyarakat dapat dilihat kembali pada tabel 5.1 mengenai standar pelayanan,tersebut bagian persyaratan pelayanan mengruaikan bahwa masyarakat melakukan perekaman di Kantor Camat atau Dinas Dukcapil Kota Kupang bagi yang belum pernah melakukan perekaman dimanapun dan menyerahkan bukti perekaman tersebut ke Dukcapil Kota Kupang.

Dari hasil wawancara dengan ibu Merlin yang merupakan masyarakat Kota Kupang, tanggal 23 November 2019, mengungkapkan bahwa:

“pemerintah dispenduk maupun pemerintah tingkat kecamatan belum pernah melakukan pendataan langsung di lapangan untuk melakukan pengurusan KTP-Elektronik”

Senada dengan Ibu Merlin, Bapak River salah seorang pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengungkapkan :

“selama ini kami belum pernah melakukan pendataan penduduk seperti yang dilakukan oleh pihak badan statistik , kami memeproleh data dari masyarakat langsung maupun melalui pemerintah kecamatan”

Jadi, dari uraian standar pelayanan DUKCAPIL dan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang memperoleh data dari tingkat kecamatan dan dari masyarakat langsung, perolehan data langsung yang dimaksud DUKCAPIL tidak turun lapangan melainkan masyarakat yang datang ke kantor DUKCAPIL atau Kantor Camat.

5.5 Disposisi atau sikap para pelaksana program

Disposisi atau kecenderungan dari pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Demikian sebaliknya, bila tingkah laku atau persepektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan tujuan dan maksud kebijakan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan mejadi sulit. Disposisi dalam penelitian ini merujuk pada pemahaman aparat pelaksana terhadap standar dan sasaran kebijakan.

- Sikap pegawai dalam melaksanakan kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak dominikus selaku masyarakat Kota Kupang,19 November 2019, mengatakan bahwa :

“berdasarkan pengalaman saya pelayanan pegawai terhadap masyarakat khusus untuk pengurusan KTP cukup baik, ada pegawai tertentu yang pelayanannya kurang ramah”

Senada dengan bapak domikus, saudara Sebastian yang merupakan masyarakat Kota Kupang mengatakan bahwa :

“pelayanan pengurusan KTP kurang memuaskan, kadang-kang mereka melayani kita dengan baik kadang juga buat kita kesal”

Dari hasil pengamatan penulis terkait pelayanan pegawai terhadap masyarakat masih cukup baik untuk standar pelayanan instansi pemerintah.

5.6 Lingkungan sosial,ekonomi dan politik

Setiap program pemerintah tentunya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat baik itu dampak secara sosial, ekonomi maupun politik. yang menjadi fokus dari penulis

saat ini adalah dampak secara sosial terhadap masyarakat dengan hadirnya program pembuatan KTP Gratis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang

- Meningkatkan tidaknya jumlah masyarakat layak KTP yang mengurus KTP

TAHUN	PENDUDUK	JUMLAH (JIWA)
2019	Wajib KTP	344.556
	Sudah Memiliki KTP	155.114
	Belum Memiliki KTP	118.442
	Jumlah Penduduk	460.804

(Sumber laporan akhir tahun Bidang Sistem Informasi Administrasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang tahun 2019)

Dari data diatas penulis mengamati bahwa jumlah penduduk yang belum mengurus KTP masih sangat banyak. Hal ini membuktikan bahwa program pembuatan KTP Gratis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang belum memberikan dampak secara signifikan terhadap kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi. Dari situasi ini dampak secara sosial dalam masyarakat terkait implementasi program pembuatan KTP Gratis masih belum nampak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Emanuel, tanggal 29 november 2019, Bapak Emanuel mengungkapkan :

“untuk jumlah kepengurusan KTP-Elektronik ini mengalami peningkatan hal ini dikarenakan oleh bertambahnya masyarakat usia layak KTP setiap tahun tetapi karena beberapa kendala jadi jumlah KTP yang dicetak pertahun itu masih minim”

Dari data dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dampak sosial

Dampak secara sosial dari implementasi program pembuatan KTP gratis belum memberikan dampak yang signifikan karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi.

b. Dampak ekonomi

Berdasarkan pengamatan penulis E-KTP memberikan begitu banyak manfaat kepada pemilikinya, selain sebagai identitas diri KTP juga sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh bantuan sosial dari pemerintah dan lain-lain. Dengan melihat jumlah penduduk wajib KTP banyak yang belum memiliki KTP tentu akan menghambat seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat kota Kupang. Implementasi program pembuatan KTP gratis saat ini belum memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat kota Kupang.

c. Dampak Politik

Berdasarkan poin sebelumnya mengenai Koordinasi antar organisasi yang masih kurang, lebih khusus koordinasi dari DPRD terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, hal ini berkaitan Peran DPRD masih sangat kurang untuk memberikan masukan kebijakan dan saran kebijakan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Dari situasi ini penulis menyimpulkan bahwa situasi politik Kota Kupang belum memberikan dampak.

5.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pembuatan KTP Gratis Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang

Dari hasil penelitian penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor pendukung maupun faktor penghambatan dalam proses implementasi Program Pembuatan KTP Gratis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yaitu :

a. Faktor pendukung

1. Berbasis online yang memudahkan proses verifikasi data
2. Perekaman bisa dilakukan di tingkat kecamatan yang memudahkan akses masyarakat untuk mengurus KTP
3. Kepenguasaan KTP yang tidak memiliki biaya (gratis)

b. Faktor penghambat

1. Kondisi sumber daya yang kurang memadai
Sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan anggaran keuangan yang masih belum mencukupi kebutuhan pertahun, kemampuan pegawai khusus dibidang operator yang masih sangat minim, peralatan yang masih sering error
2. Kurangnya komunikasi dengan instansi lain
3. Minimnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat mengenai program pembuatan KTP gratis
4. Kurangnya kegiatan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait program
5. Kedisiplinan pegawai yang masih kurang

